



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



RENJA SKPD 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Esa, serta berkat rahmat dan karunia-Nya, Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Awal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Strategis (RENSTA) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan 2019-2024.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, dimana dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD (RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 masih terdapat kekurangan, maka untuk itu dengan kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) Tahun kedepan nantinya agar lebih terarah, efektif, terpadu dan terstruktur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap dengan adanya RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) Tahun yang berfungsi untuk merencanakan perubahan kearah yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas penggunaan potensi sumber daya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi.

Program dan kegiatan yang disusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten Nias Selatan, dalam pelaksanaannya bersama masyarakat dan Pemerintah, dimana masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat.

Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan. Salah satu kegiatan Pemerintah adalah pemberian pelayanan pada masyarakat yang merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.

Mengingat ruang lingkup pelayanan umum sangat kompleks dan krusial maka senantiasa perlu dikaji dan dievaluasi secara proaktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang baik dan benar dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada prosedur dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang, dengan memperhitungkan potensi/ kekuatan, kelemahan, peluang, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan serta kendala yang ada. Rencana Strategis disusun untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta kegiatan dalam rangka terwujudnya pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hubungan Renstra PD dengan RPJMD Kabupaten adalah Renstra PD sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten untuk setiap PD yang memuat arah dan kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Nias Selatan.

Hubungan Renstra PD dan Renstra PD Provinsi adalah untuk mendukung tercapainya target nasional yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA). Dalam hal ini program nasional yang dicanangkan kepada Pemerintah Provinsi hingga ke Pemerintah Kabupaten Kota yaitu :

- 1) Capaian kepemilikan KTP-El
- 2) Capaian kepemilikan Akta Kelahiran Anak
- 3) Capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Kabupaten Nias Selatan;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
20. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 5.1_48 tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun RKPD KabupTen Nias Selatan Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan adalah untuk memberikan gambaran, melaksanakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan 5 dan mengimplementasikan Visi, Misi Tujuan dan Strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program kegiatan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019-2024.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil sampai ke tingkat kecamatan;
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan sehingga pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan hingga ke pelosok Desa;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Sebagai tolak ukur dan penilaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah memberikan dan melayani segala kebutuhan masyarakat dalam hal pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematikan Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan maju program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya 2023.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021. Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 2 sasaran dengan indikator kinerja yang telah diukur pencapaiannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang menjadi target pada tahun 2022.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada umumnya sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
Merupakan program penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan, dimana terdapat 6 kegiatan yang dilaksanakan untuk tercapainya pelaksanaan program ini. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan rutin kantor dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.
2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Program ini juga merupakan program penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang dilaksanakan yang meliputi kegiatan penyusunan dan pnyediaan data kependudukan dalam rangka terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Berikut disajikan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sampai dengan tahun 2022:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[illegible]

				SIPIL										
1	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	1 Tahun		1 Tahun						
1	01	01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dok		6 Dok	6 Dok	100	6 Dok	12 Dok	80	
1	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dok		15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	30 Dok	200	
1	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15 Dok		15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	30 Dok	200	
1	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 Dok		15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	30 Dok	200	
1	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	15 Dok		15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	30 Dok	200	

					Perubahan DPA-SKPD								
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bln		30 Org/Bln	30 Org/Bln	100	5 Org/Bln	35 Org/Bln	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap		1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	2 Lap	200
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Dok		15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	30 Dok	200
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100 %	100 %		100 %		
				Penyediaan Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	200
				Penyediaan Bahan	Jumlah Paket	30 Paket		30	30	99	30 Paket	60 Paket	200

				Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	Paket				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	10 Paket	200
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157 Lap		157 Lap	157 Lap	99	157 Lap	314 Lap	200
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang SKPD	100 %		100 %	100 %		100 %		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	100	100 Laporan	200 Laporan	200
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah	100 %		100 %	100 %		100 %		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit		22 Unit	22 Unit	99	22 Unit	44 Unit	200
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Pemeliharaan Barang Kantor	24 Unit		24 Unit	24 Unit		24 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	200

				Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
				Pemeliharaan / Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	99	1 Unit	2 Unit	200
				Pemeliharaan / Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit		22 Unit	22 Unit	100	22 Unit	44 Unit	200
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN JUMLAH PROFIL KEPENDUDUKAN	100 %		100 %	100 %		100 %		
				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan	100 %		100 %	100 %		100 %		
				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten Kota	umlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5 Dok		9 Dok	9 Dok	100	9 Dok	18 Dok	200

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas dan kualitas
- b. Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang terutama alat perekaman KTP-el yang kondisinya sudah ada yang rusak yang berada di kecamatan
- c. Gedung kantor yang tidak memadai terutama untuk pelayanan kepada masyarakat dan area parkir
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, masyarakat mengurus dokumen kependudukan apabila ada keperluan mendesak yang mewajibkan untuk melampirkan dokumen kependudukannya seperti KK, KTP, akta kelahiran dan kematian.
- e. Masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan IT terutama aplikasi pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Revisi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis pegawai Disduk Capil
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pelayanan masyarakat dengan optimal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan arah kebijakan menambah jumlah sarana dan prasarana kantor yang kurang untuk pelayanan masyarakat dengan cara menganggarkannya dalam renja.
3. Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara kecamatan, kelurahan, instansi lainnya dengan Disduk Capil terkait informasi dan pembaharuan yang menyangkut pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan arah kebijakan mengundang pihak kecamatan dan kelurahan serta instansi lainnya dalam rapat-rapat ; perbulan, triwulan, semester dan tahunan.
4. Menambah intensitas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. Melakukan inovasi – inovasi pelayanan dan terobosan – terobosan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil dengan arah kebijakan melaksanakan kegiatan pelayanan yang lebih inovatif seperti menambah mobil pelayanan keliling yang telah ada untuk bisa intens pelayanan langsung ke masyarakat, pelayanan jemput bola dengan melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi tertentu dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan inovasi-inovasi lainnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki peran pendukung dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan yaitu:

" **Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera** " sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pendukung dari pencapaian visi kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 77 tahun 2016 yang mana telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan 18 tahun 2020, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati Nias Selatan melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dinas terdiri atas :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian perencanaan
- c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri dari :
 1. seksi identitas penduduk
 2. seksi pindah datang penduduk
 3. seksi pendataan penduduk
- d. Bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri dari :
 1. seksi kelahiran

- 2. seksi perkawinan dan perceraian
- 3. seksi perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian
- e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, terdiri dari:
 - 1. seksi sistem informasi administrasi kependudukan
 - 2. seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan
 - 3. seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- f. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, terdiri dari :
 - 1. seksi kerjasama
 - 2. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - 3. seksi inovasi pelayanan
- g. Unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan non SPM.. Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat adanya permasalahan dan isu-isu strategis yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa depan.

Terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, ada beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan
2. Belum optimalnya penggunaan data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik
3. Belum adanya gedung pelayanan yang representative
4. Belum optimalnya Pencatatan biodata untuk pendataan Penduduk Rentan dan non permanen

5. Belum optimalnya Verifikasi dan Validasi Data base kependudukan

6. Belum optimalnya pemanfaatan data oleh OPD dan Lembaga pengguna

Adapun penyebab Keberhasilan (faktor pendukung) dalam pelaksanaan pelayanan Dokumen Kependudukan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya-upaya dan kebijakan dengan Inovasi Pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan KK, KTP-el Surat Keterangan Pindah dan Dokumen Kependudukan lainnya secara online dimana masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil dan bisa langsung mencetak sendiri dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya melalui email yang dikirim oleh operator
2. Pelayanan Keliling (Jemput Bola)
3. Pelayanan Jemput Bola perekaman KTP elektronik
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
5. Pelayanan Perekaman di Kantor Disdukcapil. Pada Jam Kerja mulai Jam 08.00 s/d 17.00 WIB
6. Pelayanan akta kelahiran Melalui Bidan, RS, RSB dan Yayasan serta Organisasi Kemasyarakatan yang telah melakukan perjanjian kerjasama pelayanan.
7. Kerjasama dengan OPD, lembaga dan instansi lain dalam pemanfaatan data kependudukan

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan (faktor penghambat) adalah :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melakukan Tugas dan Fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sebagian dari gedung ex. SMA 1, dengan memanfaatkan ruangan yang sangat terbatas sehingga kurang representatif ditambah dengan area parkir yang tidak memadai.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama sarana keterbatasan ruangan pelayanan dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan proses pelayanan seperti alat perekaman KTP elektronik yang sudah mulai rusak
3. Kurangnya Sumber daya Aparatur (PNS) baik dari segi kualitas maupun kuantitas

4. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi aplikasi pelayanan online Disdukcapil
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan hanya mengurusnya bila ada keperluan mendesak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dalam urusan administrasi kependudukan dituangkan dalam kebijakan Renstra Ditjenduk Capil tahun 2020-2024, dimana program prioritas presiden 2020-2024 tertuang dalam sasaran strategis kemendagri, Ada 5 program prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Reformasi Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Output/sasaran strategis kemendagri dari program tersebut :

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana
- c. Penyederhanaan regulasi
- d. Reformasi Birokrasi
- e. Transformasi ekonomi
- f. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa
- h. Pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
- i. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah
- j. Penataan wilayah dan pembangunan daerah

Berdasarkan output/sasaran strategis kemendagri tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mangacu pada sasaran point h yaitu pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik. Penyelarasan program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis Ditjen Dukcapil :

- 1) Pembangunan SDM : meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
- 2) Pembangunan infrastruktur : mewujudkan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah
- 3) Penyederhanaan regulasi : terwujudnya regulasi menuju single identity number
- 4) Pemanfaatan data kependudukan : terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, berbasis digital dan tingkat kepuasan masyarakat yang memadai.

Penyelarasan program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis Ditjen Dukcapil tersebut juga diselaraskan ke dalam sasaran dan tujuan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tahun 2019-2024 yaitu pada point 4 “ pemanfaatan data kependudukan” serta

menjadi isu stragis pada point 3 yaitu terwujudnya regulasi menuju single identity number dimana NIK menjadi data tunggal untuk semua jenis layanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	75 %
		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Jebol	50 %
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTPel)	85 %
		Persentase Permohonan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesi (SKPWNI)	100 %
		Persentase anak di bawah umur yang wajib memliki KIA	90 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	95 %
		Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	95 %
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	27 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan maju Tahun Anggaran 2025 diajikan dalam tabel sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai tahun anggaran 2024.

Keberhasilan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini tidak hanya ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan dari lintas sektoral, lintas OPD, Kecamatan, Kelurahan, termasuk masyarakat dengan segala elemen yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal serta database kependudukan yang akurat.

Upaya peningkatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan terus dilaksanakan dan ditingkatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, program nasional yang dilaksanakan oleh kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menciptakan-percepatan dalam penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nias Selatan. Tidak kalah pentingnya adalah dukungan dana untuk mewujudkan terbangunnya gedung kantor Dinas Kependudukan yang presentatif, layak dan nyaman sesuai dengan hasil penyusunan detail.

Rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sekaligus dalam rangka evaluasi secara garis besar dan menyeluruh tentang penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat pada bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nias Selatan yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan,

DERI DOHUDE, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 200003 003

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.250.000.000,00							4.079.688.480,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.250.000.000,00							4.074.019.080,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.250.000.000,00							4.074.019.080,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Nilai Lakip OPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	B Nilai/ Predikat 0 Dokumen 100 Dokum en			15 Dokumen B Nilai/ Predikat 6 Dokumen	1.245.500.000,00						B Nilai/ Predikat 15 Dokume n 6 Dokumen	4.056.219.080,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 6 Dokumen	13.559.000,00			-	-	-	-	19.024.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15 Dokumen	4.698.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.495.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15 Dokumen	2.761.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.495.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				15 Dokumen	1.402.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.016.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	4.698.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.016.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Dokumen 15 Dokumen 1 Tahun	60.255.450,00			-	-	-	-	296.375.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Ls Orang/bulan	54.001.450,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.091.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.522.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				15 Laporan	4.163.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.853.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-			35 Stel	0,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Instalasi Komponen Isntalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan	-			100 % 1 Tahun 100 % 100 %	791.842.800,00			-	-	-	-	2.163.309.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.427.600,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	175.039.600,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		486.080.380,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	212.039.600,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		760.745.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				157 Laporan	396.336.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		905.684.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			100 %	177.187.550,00			-	-	-	-	923.979.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	177.187.550,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		923.979.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			100 %	102.000.000,00			-	-	-	-	228.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	102.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		228.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-			100 % 100 % 100 %	100.655.200,00			-	-	-	-	174.730.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	48.925.200,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		83.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	21.230.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.230.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN JUMLAH PROFIL KEPENDUDUKAN	-			100 %	4.500.000,00						-	17.800.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan	-			100 %	4.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-	-	17.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		17.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	NON URUSAN						0,00							5.669.400,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							5.669.400,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Nilai Lakip OPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	B Nilai/ Predikat 0 Dokumen 100 Dokumen			15 Dokumen B Nilai/ Predikat 6 Dokumen	0,00						B Nilai/ Predikat 15 Dokumen 6 Dokumen	5.669.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 6 Dokumen	0,00			-	-	-	-	5.669.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.669.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							1.250.000.000,00							4.079.688.480,00	